



Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Mega Sulistiowati, Mohammad Hasan Bisyri

IAIN Pekalongan

megasulis350@gmail.com

Abstract:

Political participation is the activity of a person or group of people to be actively involved in politics, namely choosing the leadership of the state together directly or indirectly. These activities include making choices during elections, attending political party campaigns and becoming members of politics or mass organizations. The KPU of Pekalongan City in carrying out its duties to increase public political participation in the 2019 presidential and vice presidential elections is in accordance with what is described in the General Election Commission Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2018 concerning Socialization, Voter Education, and Community Participation in the Implementation of General Elections. The formulation of the problem: (1) How was the Pekalongan City General Election Commission's efforts in the 2019 Presidential and Vice-Presidential Elections to achieve the target of 84.02% public participation? (2) What are the supporting and inhibiting factors for public participation in the 2019 Presidential and Vice-Presidential Elections? This study uses field research, using primary and secondary data collected by observation, interview, and documentation techniques. This research approach is a sociological approach. The data analysis technique used qualitative data analysis methods.

Keywords: *Pekalongan City Election Commission, Political Participation, Election*

Abstrak:

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik, yaitu memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup menentukan pilihan saat Pemilu, menghadiri kampanye partai politik dan menjadi anggota politik maupun ormas. KPU Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019? Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Pekalongan dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target partisipasi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi tersebut salah satunya adalah strategi. Strategi yang dilakukan terdiri dari strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.

Kata Kunci: KPU Kota Pekalongan, Partisipasi Politik, Pemilu

Pendahuluan

Demokrasi adalah cara, alat, atau proses sekaligus nilai-nilai atau norma-norma yang harus dijiwai dan dicerminkan pada semua proses kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, serta berbangsa. Tegasnya demokrasi bukan sekedar cara, tapi sekaligus tujuan yang harus dibangun dengan proses yang memakan waktu yang panjang. Cara tersebut dilakukan dengan mengedepankan rakyat atau menjadikan rakyat sebagai episentrum. Artinya demokrasi juga dapat dijadikan tolak ukur seberapa jauh negara tersebut berpihak kepada rakyatnya. Partisipasi rakyat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi pun dapat kita lihat langsung dari praktiknya secara langsung yaitu dengan pemilihan umum (Diniyanto, 2016, 2019a; Muhtada & Diniyanto, 2018; Nasution, 2011).

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh salah satu lembaga negara yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPURI. Komisi Pemilihan Umum dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu dari mulai Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, hingga badan *ad hoc*, dan terdapat pula Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Mereka memiliki tugas masing-masing dari pusat hingga badan *ad hoc* terkecil.

Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bukti berjalannya demokrasi dalam suatu negara. Komponen terpenting dalam sebuah negara yaitu demokrasi dan masyarakat. Partisipasi politik atau keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah perkembangan negara dalam membentuk pemerintahan demokrasi dan memengaruhi kebijakan pemerintah menunjukkan peranan masyarakat yang paling penting dalam proses demokrasi (Miaz, 2012, p. 29). Dengan ini, keberadaan Komisi Pemilihan Umum sangat penting bagi negara Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok antara lain merencanakan serta mempersiapkan pemilihan umum (pemilu), meneliti, menerima, serta menetapkan sebagai peserta umum, dan tugas-tugas lain yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum terbukti sudah menjalankan tugas dengan baik, dilihat dari

kenaikan partisipasi politik yang meningkat pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2014. Pada tahun 2014, tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya 69,58%. Lalu pada tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berhasil mendapat 81,97% (Rahadian, 2019).

Table 1
Angka Partisipasi Politik Masyarakat

No.	Tahun Pemilihan	Angka Partisipasi
1	2009	71.7%
2	2014	69.58%
3	2019	81.97%

Sumber: Website KPU RI (Umum, n.d.).

Dalam penelitian ini akan mengulas tentang Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 ini terdapat dua pasangan calon antara lain, pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dengan perolehan suara 55,50 % dari Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan 44,50 % dari Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dari skala nasional. Sedangkan di Kota Pekalongan sendiri pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin mendapat 73.53 % sedangkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno 26.47 % (K. K. Pekalongan, 2019).

Pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum tercatat partisipasi politik masyarakat sebesar 84,02 % angka itu diperoleh dari DPT atau Data Pemilih Tetap sebanyak 230.868. Perolehan tersebut sangat melampaui target Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang hanya 77%. Jika dibandingkan dengan daerah pemilihan disekitarnya, maka Kota Pekalongan merupakan daerah yang berhasil mendapat partisipasi pemilihan tertinggi. Tercatat di daerah Kabupaten Pekalongan mendapat partisipasi pemilihan sebanyak 79%. Sedangkan di Kabupaten Batang, berhasil meraih partisipasi pemilih mencapai 82,6% (Umum, 2019).

Table 2
Angka Partisipasi Politik Masyarakat

No.	Daerah Pemilihan	Angka Partisipasi
1	Kota Pekalongan	84.02%
2	Kabupaten Pekalongan	79%
3	Kabuaten Batang	82.6%

Sumber: Website KPU RI (Umum, n.d.)

Pencapaian partisipasi masyarakat yang tinggi yang didapat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan inilah yang menjadi alasan mengapa penulis meneliti pada daerah Kota Pekalongan. Penulis bermaksud untuk mengulas kiat-kiat apa sajakah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan hingga mencapai angka 84,02%. Dimulai dari upaya peningkatan partisipasi masyarakat hingga kendala yang dihadapi. Upaya apa sajakah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan atas hal tersebut serta bagaimana cara membuat masyarakat berpartisipasi serta sebagai pemilih yang cerdas agar memilih dengan dasar hati nurani. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 hingga mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019?

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan langsung mendatangi lapangan yaitu Kota Pekalongan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Artinya peneliti akan meneliti terkait dengan aspek hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan kondisi empiris (lapangan) yang peneliti lakukan (Benuf & Azhar, 2020; Diniyanto, 2019b; Hardani et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Hingga Mencapai Target 84,02% Partisipasi Masyarakat

a. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekalongan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan adalah salah satu Komisi Pemilihan Umum Kota yang menyelenggarakan pemilu di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan sendiri merupakan kota yang berada di Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut Jawa di utara,

Kabupaten Batang di timur, serta kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Dengan empat kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan (*Kota Pekalongan, n.d.*).

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Itu sendiri adalah, *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL”*. Sedangkan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan antara lain :

- 1) Membangun SDM yang kompeten untuk penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas;
- 2) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Kemandirian, Kompetensi, Kredibilitas, Profesionalitas dan Kapabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Akuntabel, Edukatif, Berbudaya dan Beradab;
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Bersih, Efisien dan Efektif;
- 5) Mengelola Data Pemilu yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan dan Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu;
- 6) Melayani dan Memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara Adil dan Setara serta menegakkan Peraturan Pemilihan Umum secara Konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi masyarakat untuk dapat terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis; dan
- 8) Membangun kerjasama dengan stakeholder dan pihak lain guna memperkuat Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan (K. P. U. K. Pekalongan, 2019, p. 3).

Kemudian, partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang penting dari suatu negara demokrasi. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Pekalongan memperoleh angka yang signifikan. Dari target yang hanya 77% Kota Pekalongan mampu meraih partisipasi politik sebesar 84,02%. Angka 84,02% tersebut diperoleh dari jumlah pemilih sebanyak 230.868.

Partisipasi politik masyarakat sebanyak 84,02% juga merupakan suatu capaian yang baik setelah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Pekalongan yang hanya memperoleh 75,82%. Pada tahun 2014 diketahui terdapat 220.713 data pemilih tetap dan yang suara sah sebanyak 167.356 yang artinya partisipasi politik saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Pekalongan sebanyak 75,82%.

Table 3
Angka Partisipasi Politik Masyarakat

No.	Daerah Pemilihan	Angka Partisipasi
1	Kota Pekalongan	84.02%
2	Kabupaten Pekalongan	79%
3	Kabupaten Batang	82.6%

Sumber: Website KPU RI (Umum, n.d.)

Partisipasi politik masyarakat Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya sendiri merupakan partisipasi politik yang meraih paling banyak suara. Jika dibandingkan dengan daerah pemilihan disekitarnya, maka Kota Pekalongan merupakan daerah yang berhasil mendapat partisipasi pemilihan tertinggi pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Tercatat di daerah Kabupaten Pekalongan mendapat partisipasi pemilihan sebanyak 79%. Sedangkan di Kabupaten Batang, berhasil meraih partisipasi pemilih mencapai 82,6% (Umum, 2019).

Tabel 3.2
Angka Partisipasi Masyarakat Daerah Sekitar Kota Pekalongan

No.	Daerah Pemilihan	Angka Partisipasi
1	Kota Pekalongan	84.02%
2	Kabupaten Pekalongan	79%
3	Kabupaten Batang	82.6%

Sumber: Website KPU Jawa Tengah (Umum, 2019).

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Pekalongan tercatat sebanyak 193.968 suara sah dari 230.868 jumlah pemilih di Kota Pekalongan. Dengan jumlah seluruh pemilih disabilitas sebanyak 458 dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya sebanyak 197.

Kota Pekalongan memiliki empat Kecamatan yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Kecamatan Pekalongan Barat tercatat memiliki jumlah pemilih sebanyak 73.951 dengan pengguna hak pilih sebanyak 60.528. Sedangkan Kecamatan Pekalongan Timur memiliki jumlah pemilih 51.804 dan diketahui terdapat 44.010 jumlah pengguna hak pilih. Lalu Kecamatan Pekalongan Utara mempunyai

58.856 jumlah pemilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 49.813. Dan di Pekalongan Selatan tercatat memiliki jumlah pemilih sebanyak 46.257 dengan jumlah suara masuk 39.617 (K. K. Pekalongan, 2019).

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Politik per Kecamatan di Kota Pekalongan

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Pemilih	Jumlah Partisipasi
1	Pekalongan Barat	73.951	60.528
2	Pekalongan Timur	51.804	44.010
3	Pekalongan Utara	58.856	49.813
4	Pekalongan Selatan	46.257	39.617

Sumber: Website KPU Jawa Tengah (Umum, 2019).

Dengan berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa Kota Pekalongan mendapatkan antusias partisipasi masyarakat yang cukup banyak. Terlepas dari pemilih yang benar-benar antusias dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang memilih dengan hati nurani dan pemilih yang hanya asal datang ke tempat pemilihan umum.

Jadi, angka partisipasi yang didapat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dari 230.868 jumlah pemilih dengan 193.968 pengguna hak pilih, maka angka presentase yang didapat yaitu 84,02%. Angka tersebut terbilang sangat tinggi karena jika dibanding dengan daerah di sekitar Kota Pekalongan angka tersebut merupakan perolehan partisipasi masyarakat yang tertinggi. Selain itu, jika dilihat dengan perolehan angka partisipasi masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya maka pada tahun 2019 merupakan capaian tertinggi yang diperoleh Kota Pekalongan (K. K. Pekalongan, 2019).

b. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Meningkatkan Partisipasi Politik

Peran dalam meningkatkan partisipasi politik tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga penyelenggara pemilu. Peran ini dilakukan oleh banyak lembaga bahkan organisasi masyarakat. Dalam peningkatan partisipasi politik Kota Pekalongan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan bersama dengan Bawaslu, Partai-partai Politik, dan Organisasi Masyarakat.

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sangat berpengaruh dalam perolehan suara yang didapat. Komisi Pemilihan Umum berperan dalam berbagai hal, seperti memberi pengetahuan kepemiluan bagi masyarakat, menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilu, mengawal berjalannya pemilu dengan baik, serta hal lain yang bersifat informatif untuk masyarakat.

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam memberi pengetahuan seputar kepemiluan kepada masyarakat dilakukan dengan sosialisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya dengan pemasangan pamflet dan baliho pada sudut kota yang sering dilihat oleh masyarakat umum.

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam menginformasikan tahapan-tahapan pemilu yaitu dengan banyak hal. Transparansinya KPU Kota Pekalongan di media sosial saja sudah menjadi salah satu hal yang menginformasikan tahapan-tahapan pemilu. Di sana masyarakat dapat melihat tahapan sejak awal persiapan pemilu, pendaftaran pasangan calon, perekrutan badan *ad hoc*, masa kampanye, hingga berakhirnya tahapan pemilu. Selain dengan media sosial, KPU Kota Pekalongan juga menggunakan radio, televisi lokal (Batik TV), dan surat kabar yang ada di Kota Pekalongan.

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam mengawal berjalannya pemilu dapat dilihat dari berjalannya pemilu tahapan per tahapannya berlangsung dengan baik. Dalam hal ini, sangat diperlukan kerja sama yang baik dengan berbagai lembaga, seperti dengan bawaslu, kepolisian, dan lain-lain.

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sangat banyak dalam peningkatan partisipasi politik dan tidak dapat dijelaskan satu persatu. hal kecil yang tidak terlihat saja bisa menjadi salah satu peran KPU Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi, tidak dapat dijabarkan secara detail bagaimana saja peran-peran KPU Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

a. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Meningkatkan Partisipasi Politik

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan bekerja sama dengan berbagai media, seperti radio yang ada di kota Pekalongan, televisi lokal yaitu batik TV, serta surat kabar. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan juga memanfaatkan sarana internal sebagai salah satu strategi meningkatkan partisipasi politik. Yaitu dengan memanfaatkan sosial media Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, media tempel yang dipasang pada setiap titik krusial di Kota Pekalongan, serta kegiatan langsung lainnya (Wawancara dengan Muhammad Bilal selaku Anggota KPU Kota Pekalongan pada tanggal 15 Mei 2021).

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kaitan peningkatan partisipasi politik pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang ini berfokus pada peningkatan partisipasi politik untuk jangka waktu yang panjang ke depannya. Sedangkan jangka pendek, berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 (Wawancara dengan Yudi Rolies Priyadi selaku Staff KPU Kota Pekalongan pada tanggal 9 Maret 2021).

Strategi jangka panjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan antara lain yaitu kursus kepemiluan, *KPU goes to campus*, gelar budaya dan pawai-pawai budaya di Kota Pekalongan. Sedangkan strategi jangka pendek yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan, yaitu kegiatan Relasi atau Relawan Demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi (K. K. Pekalongan, n.d., p. 2).

b. Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik dan Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Partisipasi politik banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografis, lokasi, sarana prasarana, dan afiliasi politik orang tua,

penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum, peserta pemilu, kandidat, perilaku dan sikap, budaya politik, motivasi masyarakat, waktu penyelenggara Pemilu metode dan sosialisasi. Dari banyaknya faktor yang disebutkan di atas, dapat diambil beberapa faktor yang dapat diterapkan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Yaitu motivasi masyarakat, sosialisasi, serta waktu penyelenggaraan (Wawancara dengan Muhammad Bilal selaku Anggota KPU Kota Pekalongan pada tanggal 16 Mei 2021).

Selain hal tersebut, terdapat pula faktor penghambat partisipasi politik masyarakat Kota Pekalongan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Faktor penghambat antara lain yaitu anggaran, tidak sejalan rencana dengan kegiatan, dan tidak sesuai budaya dengan even-even yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

Kemudian terkait dengan indikator keberhasilan partisipasi politik yang baik dalam suatu daerah yaitu antara lain, (1) pengetahuan yang baik oleh masyarakat mengenai pemilu, (2) adanya pemilu berkualitas yang tidak hanya berkuantitas saja, (3) pelaksanaan azas pemilu yang baik, (4) penyelenggara pemilu yang kredibel, (5) dan pelaksanaan pemilu yang damai.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum, tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dari masyarakat. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Pekalongan dapat dilihat secara jelas oleh masyarakat selama tahapan pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Kota Pekalongan melakukan berbagai macam kegiatan untuk mengajak dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pemilihan umum. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam pemilihan umum, yaitu menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan dan memberitahu kepada masyarakat bahwa setiap individu yang usia diatas tujuh belas tahun memiliki hak dan kewajiban dalam pemilihan umum.

Salah satu indikator efisiensi partisipasi politik masyarakat Kota Pekalongan adalah Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Pekalongan memperoleh angka yang signifikan. Dari target KPU Pusat yang hanya 77% untuk Kota Pekalongan, mampu meraih partisipasi politik sebesar 84,02%. Angka 84,02% tersebut diperoleh dari jumlah pemilih sebanyak 230.868.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya membuktikan bahwa di Indonesia pada masa sekarang ini menggunakan model partisipasi politik otonom (*autonomus political participation*). Dari dua model partisipasi politik yang ada di Indonesia, pada masa modern ini Indonesia menggunakan model partisipasi politik otonom (*autonomus political participation*), bukan lagi model partisipasi politik termobilisasi (*mobilized political participation*), dimana masyarakat politik semata-mata digerakkan oleh elit yang berkuasa.

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sangat berpengaruh dalam perolehan suara yang didapat. Komisi Pemilihan Umum berperan dalam berbagai hal, seperti memberi pengetahuan kepemiluan bagi masyarakat, menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam pemilu, mengawal berjalannya pemilu dengan baik, serta hal lain yang bersifat informatif untuk masyarakat.

Peran KPU Kota Pekalongan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sudah sangat berhasil. Hal ini dibuktikan dengan perolehan angka partisipasi yang signifikan. Dari target KPU Pusat yang hanya 77% untuk Kota Pekalongan, mampu meraih partisipasi politik sebesar 84,02%. Angka 84,02% tersebut diperoleh dari jumlah pemilih sebanyak 230.868.

Peran yang baik yang telah dilakukan KPU Kota Pekalongan ini telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Peraturan. Sosialisasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan;
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah melakukan peran dengan memenuhi kriteria berdasarkan hal tersebut

di atas. Serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah menunjukkan telah membaiknya sistem pemilu di masa modern sekarang ini, seperti model partisipasi politik dan bentuk partisipasi yang telah berkembang menjadi lebih baik dan sesuai dengan asas pemilu yang baik.

Peran yang dilakukan KPU Kota Pekalongan juga membawa masyarakat untuk turut mengamalkan Surat An Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang dipercaya untuk melaksanakan amanat tersebut.” (QS.An-Nisa: 58)

Masyarakat turut berpartisipasi politik berkat peran baik yang dilakukan KPU Kota Pekalongan. Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat. Jadi, menurut penulis, tidak terdapat kesalahan dan bahkan terdapat sebuah prestasi dengan adanya perolehan partisipasi masyarakat yang melebihi standar Nasional yang telah ditetapkan.

c. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Strategi peningkatan partisipasi politik masyarakat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dilakukan dengan jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini kaitannya dengan waktu pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Strategi jangka panjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan antara lain yaitu kursus kepemiluan, *KPU goes to campus*, gelar budaya dan pawai-pawai budaya di Kota Pekalongan. Sedangkan strategi jangka pendek yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan, yaitu kegiatan Relasi atau Relawan Demokrasi.

Berdasarkan dari apa yang dilakukan masyarakat Kota Pekalongan, bentuk partisipasi yang telah dijelaskan oleh P Huntington dan Joan Nelson hanya beberapa yang masuk dalam kriteria bentuk partisipasi masyarakat Kota Pekalongan. Hal ini disebabkan karena klasifikasi bentuk partisipasi oleh Huntington dan Nelson merupakan fenomena partisipasi politik kontemporer yang tidak megikut sertakan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan

diskusi politik, menikmati berita politik, dan lain-lain yang berkaitan dengan skala subekti individu seperti yang dilakukan masyarakat Kota Pekalongan (Hadiwijoyo, 2012, p. 70).

Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dinilai sudah mampu menarik perhatian banyak orang. Ini dibuktikan dengan banyaknya perolehan angka partisipasi politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Kota Pekalongan. Hal ini juga terbukti telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pekalongan banyak hal baik, sosialisasi partisipasi kepada masyarakat dalam bentuk tatap muka dan dalam bentuk digital (online). Dalam bentuk tatap muka, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan pemetaan segmentasi pemilih berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 menyebutkan sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
 1. Keluarga
 2. Pemilih pemula
 3. Pemilih muda
 4. Pemilih perempuan
 5. Pemilih penyandang disabilitas
 6. Pemilih berkebutuhan khusus
 7. Kaum marjinal
 8. Komunitas
 9. Keagamaan
 10. Relawan demokrasi dan
 11. Warga internet (*netizen*);
- b. Masyarakat umum:
 1. Media massa
 2. Partai politik peserta pemilu
 3. Pengawas
 4. Pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau Pemilu luar negeri
 5. Organisasi kemasyarakatan

6. Masyarakat adat dan

7. Instansi pemerintah.

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah melakukan peran dan strategi dengan efektif dan memenuhi kriteria berdasarkan hal tersebut di atas. Serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah menunjukkan telah membaiknya sisten pemilu di masa modern sekarang ini, seperti model partisipasi politik dan bentuk partisipasi yang telah berkembang menjadi lebih baik dan sesuai dengan asas pemilu yang baik. Menurut penulis, tidak terdapat kesalahan dan bahkan terdapat sebuah prestasi dengan adanya perolehan partisipasi masyarakat yang melebihi standar Nasional yang telah ditetapkan.

d. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik di Kota Pekalongan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat antara lain, status sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografis, lokasi, sarana prasarana, dan afiliasi politik orang tua (Muslim, 2018, p. 25). Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di Kota Pekalongan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, faktor-faktor di atas sangat berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

1) Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat seperti yang dijelaskan dalam bab 2 yaitu antara lain, status sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografis, lokasi, sarana prasarana, dan afiliasi politik orang tua (Muslim, 2018). Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan di Kota Pekalongan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, faktor-faktor di atas sangat berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

Status sosial dan ekonomi masyarakat, di Kota Pekalongan walaupun masih banyak masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang masih rendah, tetapi Kota

Pekalongan merupakan salah satu Kota/kabupaten yang memiliki status sosial dan ekonomi cukup tinggi dibanding daerah di sekitarnya (Sabana, 2011, p. 32). Dengan hal ini, membuktikan teori bahwa semakin tinggi status sosial dan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam daerah tersebut.

Kondisi geografis, dalam hal ini sangat berpengaruh dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. Kondisi geografis Kota Pekalongan yang wilayahnya merupakan dataran rendah yang dipenuhi permukiman dan bukannya daerah pegunungan atau kepulauan yang sulit dijangkau ini membuktikan bahwa faktor geografis memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat.

Lokasi, seperti halnya kondisi geografis, lokasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat. Lokasi Kota Pekalongan yang strategis untuk tempat sosialisasi dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mempermudah segala akses dalam pemenuhan partisipasi politik masyarakat.

Sarana pra sarana, hal ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Sarana pra sarana yang memadai turut meningkatkan partisipasi politik. Terbukti pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di kota Pekalongan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan mengatasi kendala anggaran dengan menyediakan sarana pra sarana yang baik untuk menunjang peningkatan partisipasi politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di kota Pekalongan.

Afiliasi politik orang tua, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan partisipasi politik. Banyaknya paham politik yang telah diketahui bahkan memiliki keterikatan dari masyarakat Kota Pekalongan mempermudah sosialisasi pentingnya partisipasi politik untuk warga Kota Pekalongan.

2) Faktor Penghambat

Selain faktor di atas, dalam menjalankan tugasnya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan juga mengalami berbagai faktor penghambat dalam melaksanakannya. faktor penghambat yang dialami Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain yaitu dalam hal anggaran, lalu tidak sejalanannya rencana dan realisasi pada suatu program, serta tidak sesuainya budaya setempat dengan *event* yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Hal-hal tersebut tentu berdampak besar pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dialami Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Wawancara dengan Muhammad Bilal selaku Anggota KPU Kota Pekalongan pada tanggal 16 Mei 2021).

Berdasarkan faktor penghambat yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui hal-hal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan untuk mengatasi kendala tersebut. Pada faktor penghambat dalam permasalahan anggaran untuk sosialisasi yang sering terpotong untuk kegiatan tahapan penting dalam pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan mengatasi hal ini dengan memangkas kegiatan pemilu yang semula terdapat 15 kegiatan sosialisasi, maka hanya dilakukan 10 kegiatan sosialisasi.

Dalam faktor penghambat tidak sejalanannya rencana dan realisasi di suatu program pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan, mereka mengatasi hal ini dengan menunda kegiatan dan bukannya tidak melakukan kegiatan sama sekali. Selanjutnya terakhir dalam faktor penghambat eksternal tidak sesuai budaya setempat dengan *event* yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan mengatasinya dengan menggali lebih dalam bagaimana kondisi dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Dengan cara-cara mengatasi faktor penghambat di atas dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dinilai sudah mampu mengatasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Ini dibuktikan dengan banyaknya perolehan angka partisipasi politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 Kota Pekalongan. Hal ini juga terbukti telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa, pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah memenuhi hal-hal yang tersebut di atas. Serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah membuktikan faktor-faktor yang telah disebutkan dalam bab 2 turut berpengaruh dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan perolehan angka partisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tersebutlah yang mampu menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagai contoh dari Komisi Pemilihan Umum lain, dengan mengetahui kiat-kiat apa saja yang dilakukan yang telah dijelaskan dalam Bab 3 serta dapat mempelajari faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat yang telah dilalui Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Simpulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pelaksana pemilu dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal ini berakibat pada membaiknya sistem pemilu di

Kota Pekalongan. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mencapai target 84,02% partisipasi masyarakat. Dengan menjalankan peran yang baik yang telah mereka penuhi. Peran yang dilakukan KPU Kota Pekalongan juga membawa masyarakat untuk turut mengamalkan Surat An Nisa Ayat 58 yang memerintahkan untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Masyarakat turut berpartisipasi politik dan mengamalkan nilai Islam berkat peran baik yang dilakukan KPU Kota Pekalongan.

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekalongan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang seperti kursus kepemiluan, KPU goes to campus, gelar budaya, dan pawai-pawai budaya di Kota Pekalongan. Dan strategi jangka pendek yang dilakukan dalam waktu dekat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yaitu kegiatan Relasi atau Relawan Demokrasi.

Kegiatan strategi yang dilakukan KPU Kota Pekalongan juga menjadi salah satu sebab masyarakat turut mengamalkan Surat An-Nisa ayat 58 yang secara tersirat ayat tersebut memerintahkan umat untuk berpartisipasi dalam politik. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah status sosial dan ekonomi masyarakat, kondisi geografis, lokasi, sarana prasarana, dan afiliasi politik orang tua. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggaran yang terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran untuk kegiatan, tidak sejalan rencana dan realisasi pada suatu program, serta kendala dalam budaya pada setiap masyarakat.

Daftar Pustaka

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.

- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Graha Ilmu.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Kota Pekalongan. (n.d.). Wikipedia.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Masa Orde Baru dan Reformasi*. UNP Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muslim, S. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih dalam Pilkada Serentak 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Nasution, A. B. (2011). *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*. Kompas Media Nusantara.
- Pekalongan, K. K. (n.d.). *Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi (Relasi)*.
- Pekalongan, K. K. (2019). *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019*.
- Pekalongan, K. P. U. K. (2019). *Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Rahadian, L. (2019). *Tingkat Partisipasi Pemilu 2019 Naik: Positif atau Negatif?* Bisnis.Com.
- Sabana, C. (2011). Analisis Pengembangan Kota Pekalongan sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Di Jawa Tengah. *JEBI: Jurnal EKonomi & Bisnis*, 09(01), 23–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v9i01.167>
- Umum, K. P. (n.d.). *No Title*. Komisi Pemilihan Umum.
- Umum, K. P. (2019). *Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden*. Komisi Pemilihan Umum.